

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan bilateral Indonesia-Rusia sudah terjalin lama, sekitar 60 tahunan, lebih tepatnya dimulai dari 1949<sup>1</sup>. Dengan memiliki hubungan bilateral, Indonesia dan Rusia banyak bekerja sama dalam berbagai bidang, antara lain kerjasama politik, kerjasama ekonomi, dan kerjasama lainnya. Dan seperti hubungan bilateral negara-negara lainnya, sebuah hal ataupun kejadian yang terjadi memiliki keterkaitan antara dua belah negara yang memiliki hubungan bilateral ini akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral tersebut, dan yang terjadi pada Mei 2012 adalah tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Bogor, Jawa Barat.

Tragedi Sukhoi 2012 tentu berpengaruh terhadap hubungan antara hubungan bilateral Indonesia-Rusia karena kejadian ini terjadi di Indonesia dan Sukhoi adalah perusahaan perakit pesawat yang berasal dari Rusia, sehingga sedikit banyak kejadian ini berpengaruh terhadap hubungan bilateral antara kedua negara tersebut.

Pesawat Sukhoi yang terjatuh di Gunung Salak ini ialah pesawat komersil pertama yang dibuat oleh perusahaan Sukhoi. Sukhoi sendiri sebelumnya perusahaan yang konsen membuat pesawat tempur, dimana Indonesia ialah salah satu negara konsumennya karena semenjak Indonesia terbentuk (merdeka) antara

---

<sup>1</sup> [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?aid=7006&coid=4&caid=33&gid=](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7006&coid=4&caid=33&gid=), diakses 4 September 2012.

Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral, terutama Rusia ialah salah satu negara maju yang paling pertama memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia paska kemerdekaan Indonesia di proklamirkan, yaitu empat tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Rusia karena dalam tragedi ini terdapat korban jiwa dari kedua belah negara, ini yang menyebabkan mengapa tragedi ini menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak negara, karena akan berpengaruh terhadap hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Ditambah pada tahun 2012 sebenarnya hubungan bilateral Indonesia-Rusia semakin membaik dan dekat setelah sebelumnya sempat menurun sampai ke titik terendah, yaitu pada jaman orde baru, pada pemerintahan presiden Indonesia saat itu, Soeharto. Walaupun pada jama orde baru hubungan bilateral Indonesia-Rusia tidak sampai putus<sup>2</sup>.

Tragedi Sukhoi yang memakan 45 korban jiwa, terdiri dari warga negara Indonesia dan Rusia ini terus berkembang menjadi masalah serius dari “hanya” sebuah kecelakaan yang melibatkan dua negara Indonesia-Rusia karena terdapat korban jiwa dari kedua belah pihak negara tersebut, dan sudah seharusnya sebagai negara, Indonesia dan Rusia melindungi setiap warga negaranya. Menjadi masalah yang lebih besar seiring berkembangnya isu-isu yang terus terbentuk dan tercantum di media, seperti masalah kelayakan pesawat jet komersil Sukhoi yang tidak memenuhi standar ataupun tidak terdapatnya ijin terbang pesawat Sukhoi tersebut. Ijin yang dimaksud ialah ijin perusahaan Sukhoi yang akan melakukan

---

<sup>2</sup>*ibid.*

demonstration flight untuk penjualan pesawat komersil pertamanya ini kepada konsumen Indonesia. Isu-isu yang muncul akan semakin berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara karena banyaknya isu-isu baik positif maupun negatif yang bermunculan dari pihak Indonesia maupun dari pihak Rusia, sehingga baik Indonesia dan Rusia harus mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi tragedi sukhoi dan isu-isu yang terdapat didalamnya agar tidak berdampak buruk pada hubungan bilateral antara Indonesia-Rusia yang sedang akhir-akhir ini dalam tahap berkembang pesat sebelum terjadinya tragedi Sukhoi tersebut.

## **B. Pokok Permasalahan**

Melalui uraian latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalah yaitu: Bagaimanakah hubungan bilateral Indonesia-Rusia pasca tragedi Sukhoi bulan Mei 2012?

## **C. Kerangka Teoritik**

Kecelakaan Sukhoi ini sebenarnya hanyalah sekedar hubungan bisnis antara sebuah perusahaan swasta Indonesia (PT Sky Aviation) dengan perusahaan perakit pesawat Rusia, Sukhoi. In,membesarmenjadi sebuah permasalahan bagi kedua negara karena jatuhnya korban jiwa dari Indonesia maupun Rusia, dan tiap negara bukan hanya sebatas melakukan perlindungan terhadap warga negaranya masing-masing, tetapi juga karena akan adanya kepentingan-kepentingan yang terdapat di setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam menangani

kecelakaan ini. Respon-respon dari Indonesia dan Rusia inilah yang mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara tersebut.

### **1. Hubungan Bilateral**

Penulis menggunakan acuan sebagai kerangka pemikiran untuk menentukan suatu hipotesa sebagai jawaban atas rumusan masalah ini, yaitu Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan. Mas'ood (1994) mengemukakan bahwa Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan memusatkan perhatian pada saling keterkaitan interaksi antara negara dengan pasar, lingkungan domestik dengan internasional, dan pemerintah dengan masyarakat<sup>3</sup>.

Munculnya Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) sebagai negara adidaya, kemerosotan dan kemudian kebangkitan kembali Eropa dan Jepang sebagai aktor utama, peningkatan status beberapa negara kurang berkembang menjadi negara industri baru, peredaan ketegangan Timur-Barat dan peningkatan ketegangan Utara-Selatan, perubahan drastis sistem politik Uni Soviet, runtuhnya pemerintahan komunis di Eropa Timur, dan sebagainya adalah beberapa contoh proses perubahan yang menandai politik dunia<sup>4</sup>. Dan semakin banyaknya isu-isu ekonomi yang masuk kedalam agenda politik internasional tingkat tinggi<sup>5</sup>.

Kaum liberal berasumsi bahwa kerjasama ekonomi internasional harus bersifat harmonis dan menguntungkan bagi yang terlibat didalamnya<sup>6</sup>. Jadi apabila perdagangan internasional dibebaskan dari pembatasan dan peraturan-

---

<sup>3</sup> Dr. Mohtar Mas'ud, *Ekonomi-Politik Internasional dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994, hal. 4.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hal. 74.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 75.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 42.

peraturan pemerintah, setiap aktor yang terlibat akan bisa memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia sehingga kesejahteraan akan meningkat. Negara-negara maju mulai merasakan bahwa perluasan cakupan sistem perdagangan sangatlah penting. Ada tiga alasan mendasar, yaitu 1) daya saing dalam perdagangan internasional tergantung pada penggunaan jasa yang semakin berkembang serta teknologi canggih, 2) ada prospek untuk menjual jasa dan ekspor barang dengan komponen teknologi canggih ke negara sedang berkembang, dan 3) perlunya perluasan kesempatan investasi dari negara maju ke negara sedang berkembang.<sup>7</sup>

Inti dari kerjasama ekonomi internasional ini adalah terbentuknya pasar bebas yang berupa akses yang luas bagi sektor industri, perdagangan dan jasa berupa penurunan atau penghilangan hambatan tarif dan nontarif seperti bea masuk produk-produk tertentu dengan tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa sendiri, masing-masing negara mendapatkan keuntungan berimbang. Menurut William H. Cooper, yang dimaksud dengan perdagangan bebas adalah:

*Free trade areas are arrangements among two or more countries under which they agree to eliminate tariffs and nontariff barrier on trade in goods among themselves. However, each country maintains its own policies, including tariffs on trade outside the region*<sup>8</sup>.

Keinginan untuk melakukan perdagangan bebas muncul berkaitan dengan adanya pertumbuhan kelompok-kelompok kekuatan ekonomi, apakah itu uang berskala regional maupun internasional berdasarkan pada kebutuhan Negara maju.

---

<sup>7</sup> Hira Jhamtani, *WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga*, Yogyakarta: INSISTPress, 2005, hal. 18.

<sup>8</sup> William H. Cooper, *Free Trade Agreements: Impact on U.S. Trade and Implication for U.S. Trade Policy*, CRS Report for Congress, August 1, 2006.

Hal ini membutuhkan suatu pengembangan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar dengan melakukan penetrasi ekonomi ekonomi sebagai substansi perubahan-perubahan atas konflik-konflik politik.

Hubungan bilateral (Inggris: bilateral relations atau bilateralism) adalah suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua Negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral hanya melibatkan dua negara, karena *bi* artinya adalah dua.

Hubungan bilateral yaitu bentuk hubungan kerjasama (diplomatis) antara satu Negara (NKRI) dengan Negara atau blok Negara lainnya, yang mana Negara-negara sahabat tersebut berada di benua yang berbeda. Misalnya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dst), Amerika, Vatikan dan lainnya.

Hal tersebut mengacu kepada tujuan kepentingan nasional yang tertuang dalam Perpres No. 27/2005 mengenai Tiga Agenda Pembangunan Nasional guna mewujudkan masyarakat aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Hubungan tersebut dijalankan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati (mutual respect) dan hubungan yang saling menguntungkan (mutually beneficial relationship) baik melalui pendekatan secara kelompok maupun bilateral (group and bilateral approach)<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup><http://naniwidiawati.blogspot.com/2009/04/hubungan-bilateral-multirateral.html>. Diakses 5 september 2012.

Manfaat untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu lebih baik ketimbang bersikap konfrontatif dengan negara tersebut. Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara. di dalam hubungan internasional hubungan yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan. Menurut Kusumohamidjoyo hubungan bilateral diartikan Suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

Jadi dalam kerjasama bilateral antara dua negara letak geografisnya yang saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan yang cukup berarti. Perkembangan yang menakjubkan telah memungkinkan semua itu. Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain telah menjadikan letak geografis yang berjauhan tidak lagi menjadi penghalang yang berarti. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil interaksi kedua negara dalam berbagai bidang.

Dilaksanakannya kerjasama bilateral antar dua negara dirasakan akan sangat penting artinya, oleh karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan negara lain. Pemanfaatan modal dasar berupa SDA (Sumber Daya Alam) dalam pencapaian tujuan dan kepentingan nasional itu mutlak dilakukan, namun keterbatasan akibat perbedaan letak geografis, keadaan iklim dan luas wilayah negara tidak dapat dihindari. Inilah yang disebut sebagai “endowment factor” yang lebih merupakan anugerah Tuhan terhadap negara tersebut.

Suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain akan mengacu pada kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Terdapat negara yang kaya akan sumber daya alam namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya, sementara di pihak lain ada negara yang miskin akan sumber daya alam namun memiliki kemampuan teknologi untuk mengolahnya, dengan adanya perbedaan tersebut maka kemungkinan untuk berinteraksi dalam kerangka kerjasama sangat besar dimana hasil kerjasama tersebut akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan bangsa negara itu.

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan internasional di definisikan dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Dalam kamus politik internasional, hubungan bilateral secara sederhana dijelaskan sebagai, “...keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau

terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)” .Batasan seperti ini mengandung maksud bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral ini, dimana yang paling umum adalah bidang perdagangan, pendidikan dan sosial budaya, politik bahkan pertahanan keamanan.

Istilah bilateral atau hubungan bilateral adalah untuk mengasumsikan hubungan yang terjadi antara dua negara yang baik berdekatan maupun berjauhan secara geografis seperti yang dikemukakan oleh Kusumohamidjojo tentang hubungan bilateral sebagai berikut; Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi.

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa :

*Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi. (Plano, 1990,7).*

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa *“hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)”*. (Krisna, 1993, 18)

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Adapun menurut **Holsty** dan **Azhary** tentang variabel-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah :

1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara.
2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan.
3. Kredibilitas ancaman serta gangguan.
4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan.
5. Responivitas di kalangan pembuat keputusan. (Hostly. 1988, 22)

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni : konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Serta terbiannya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa :

Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tipe yang pertama menyangkut

kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dianggap membaawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama<sup>10</sup>.

Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri senantiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk sistem yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan<sup>11</sup>. Dalam kaitannya dalam *rationality* dan *foreign policy*, bahwa perwujudan atau penentu sasaran, objek atau mitra hubungan merupakan pilihan yang rasional dengan memperhitungkan sirkumstansi internasional posisi politik dipentas internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai<sup>12</sup>. Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bias jadi mengaandung makna konflik dan kerjasama<sup>13</sup>.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara, dan tidak tergantung hanya pada negara dekat saja melainkan juga negara yang jauh letaknya secara geografis. Dengan

---

<sup>10</sup> William Coplin, Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah, Terjemahan Mercedes Marbun

<sup>11</sup> Sudarsono "Remunerasi" dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia hal 607

<sup>12</sup> Paul R Viotti and Mark A. Kauppi, 1998, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism hal 547

<sup>13</sup> <http://portal-hi.net/index.php/teori-teori-realisme/72-konsep-hubungan-bilateral>. Diakses 5 september 2012.

adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis diantara kedua negara. Dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut tidak lepas dari adanya hubungan yang saling mempengaruhi yang memuat reciprositas atau adanya hubungan timbal balik antar dua pihak (dua negara).

Dua negara yang menjalin kerjasama bilateral ini tentu mengharapkan keuntungan. Kerjasama akan melahirkan kesepakatan bersama berupa ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bersama bagi terjadinya harmonisasi hubungan diantara keduanya. Tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah dilahirkan merupakan kebijakan yang akan memberi keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara yang hendak dicapainya<sup>14</sup>.

Di lain sisi, kecelakaan yang terjadi pada pesawat sukhoi pada tahun 2012 di Indonesia berdampak pada hubungan bilateral antara Indonesia sebagai negara dimana tempat kejadian kecelakaan itu berada dengan Rusia sebagai negara asal perusahaan perakit pesawat yang mengalami kecelakaan.

Karena kejadian kecelakaan inilah yang menyebabkan timbulnya tindakan-tindakan politik luar negeri dari Indonesia maupun Rusia. Tindakan-tindakan luar negeri Indonesia maupun Rusia akan dapat dijelaskan dengan menggunakan teori-teori politik luar negeri dan sifat politik luar negeri dibawah ini.

---

<sup>14</sup> <http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2232271-konsep-hubungan-bilateral/#ixzz25Y091CGr>. Diakses 5 september 2012.

## 2. Politik Luar Negeri

### a. Definisi

Hubungan Internasional, politik internasional dan politik luar negeri merupakan satuan analisa yang saling terkait dan sulit dikenali batasannya.<sup>15</sup> Studi politik luar negeri dan studi hubungan internasional merupakan sinonim.<sup>16</sup> Sangat sukar untuk memberi pengertian yang sebaik-baiknya kepada politik luar negeri. Dalam pengertian yang luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya, dalam hubungannya dengan negara lain.<sup>17</sup> Politik luar negeri mencakup semua tindakan suatu negara, yang mempengaruhi sikapnya terhadap negara lain, kelompok maupun perhimpunan dan pakta negara-negara lain.<sup>18</sup> Gibson dalam bukunya, *The Road to Foreign Policy*, mendefinisikannya sebagai rencana komprehensif yang dibuat dengan baik, didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, untuk menjalankan bisnis pemerintahan dengan negara lain.<sup>19</sup> Menurut James M. McCormick, *foreign policy, a course of action or set of principles adopted by a nation's government to define its relations with other countries or groups of countries.*<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup>Tulus Warsito, M.Si, *Teori-teori Politik Luar Negeri: Relevansi dan Keterbatasannya*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1998, hal 23-24.

<sup>16</sup>J.E Dougherty & R.L. Pfaltzgraf Jr., *Beberapa Teori Hubungan Internasional*, (terj), M. Amien Rais, Yogyakarta, FISIPOL UGM, 1983, hal 25.

<sup>17</sup>Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik*, Terj Zulkifly Hamid, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 613.

<sup>18</sup>B.N. Marbun, SH, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 446.

<sup>19</sup>Dikutip dari Gibson, *The Road to Foreign Policy*, dalam buku S.L Roy, *Diplomasi*, Terj. oleh Herwanto dan Mirsawati, CV. Rajawali, Jakarta, 1991, hal. 31.

<sup>20</sup> James M. McCormick, *Foreign Policy*, Encarta : Reference Library 2009, 1993-2008, Microsoft Corporation.

menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, *foreign policy* adalah strategi atau rangkaian kegiatan tindakan yang terencana, yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan dari suatu negara terhadap negara lain atau entitas internasional, ditujukan untuk meraih tujuan spesifik yang terdefinisi intern bagi kepentingan nasional.

*Foreign Policy is strategy or planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest.*<sup>21</sup>

Politik luar negeri dalam aspeknya yang dinamis adalah sebuah sistem tindakan suatu pemerintahan terhadap pemerintahan lain atau suatu negara terhadap negara lain.<sup>22</sup> Politik luar negeri dapat dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk sejarah aliansinya dengan negara-negara lain, budayanya, bentuk pemerintahannya, ukuran, lokasi geografisnya, hubungan ekonomi dan kekuatan militernya.<sup>23</sup>

Analisa tentang hubungan Indonesia-Rusia merupakan analisa hubungan internasional, politik internasional dan politik luar negeri. Analisa mengenai hubungan antar kedua negara dengan pengaruhnya kecelakaan pesawat sukhoi yang terjadi untuk hubungan bilateral Indonesia-Rusia serta kebijakan-kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh Indonesia maupun Rusia dalam penyelesaian kasus kecelakaan ini merupakan kasus yang akan dibahas.

---

<sup>21</sup>Dikutip dari Jack C. Plano dan Roy Olton, dalam Drs. Djumadi M. Anwar, M.Si., *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, Hubungan Internasional FISIPOL UMY, 2005.

<sup>22</sup>Roy, op.cit.

<sup>23</sup>McCormick, op.cit.

Dalam hubungan dengan negara lain, sebuah negara memiliki kebijakan politik luar negeri yang meliputi semua kebijakan yang diambil oleh negara dengan negara lain. Kebijakan luar negeri adalah kebijakan suatu negara dalam bertindak, bereaksi dan berinteraksi dengan negara-negara lain atau terhadap lingkungan regional/internasional.<sup>24</sup> Output kebijakan luar negeri biasanya merupakan tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu tindakan dalam lingkungan. Tujuan dan tindakan negara lain menentukan agenda masalah politik luar negeri antara dua pemerintahan atau lebih. *Tipe* tanggapan (mendamaikan, mengancam, dan sebagainya) biasanya akan serupa dengan stimulus; artinya kebanyakan tindakan politik luar negeri cenderung bersifat timbal baik.<sup>25</sup>

Pada dasarnya politik luar negeri mengandung tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Cecil V. Crabb, mengatakan bahwa politik luar negeri merupakan sintesa dari tujuan (kepentingan nasional) dan kemampuan dari suatu negara. Jadi, di dalam politik luar negeri terdapat dua elemen, yaitu : tujuan (*nasional objectives*) yang hendak dicapai serta saran-saran (*means*) untuk mencapainya.

*Reduced to its most fundamental ingredients, foreign policy consist of two element : national objectives to be achieved adn means for achieving them. The interaction between national goals and the resources for attaining is the perennial*

---

<sup>24</sup>Ali Muhammad, M.A., *Kebijakan Luar Negeri Australia*, diktat perkuliahan Politik dan Pemerintahan Australia, Hubungan Internasional FISIPOL UMY, 2005, hal 1.

<sup>25</sup>K.J. Holsti, *Politik Internasional : Kerangka untuk Analisis*, Terj. jilid 2, Erlangga, Jakarta, 1998, hal 118.

*subject of statecraft. In its ingredients the foreign policy of all nations, great and small, is the same.*<sup>26</sup>

Dalam menganalisa terjadinya kebijakan politik luar negeri Indonesia terhadap Rusia ataupun sebaliknya, didasarkan pada pertimbangan internal (kepentingan nasional) dan kondisi eksternal (tekanan internasional).

### **b. Tujuan dan Faktor Pendukung Politik Luar Negeri**

Secara garis besar setiap politik luar negeri bertujuan mencapai kepentingan nasional, namun sebuah kepentingan nasional adalah konsep abstrak yang harus dikonkretkan. Kebijakan luar negeri suatu negara biasanya bertujuan memelihara dan mempromosikan kepentingan ekonomi politiknya di luar negeri dan posisinya di masyarakat internasional.<sup>27</sup> Ada lima tujuan politik luar negeri menurut Totton J. Anderson.<sup>28</sup>

#### 1. Mempertahankan Integritas Negara

integritas disini adalah keberadaan negara mencakup wilayah geografis yang dimiliki negara dan penduduk negara itu, baik yang berada dalam kesatuan wilayah maupun di negara lain.

#### 2. Meningkatkan Kepentingan Ekonomi

Prinsip kedua yang mendasari pemilihan tujuan ialah kewajiban pemerintah untuk meningkatkan hidup warga negaranya. Kesejahteraan bersifat menyeluruh untuk seluruh warga negara dan bukan

---

<sup>26</sup>Dikutip dari Cecil V. Crabb, Jr, dalam buku T.A Coloumbis and James H. Wolfe, *Introduction to International Relations : Power and Justice*, Prentice-Hall, Inc Englewood, 1978, hal 89.

<sup>27</sup>McCormick, op.cit.

<sup>28</sup>Rodee, op.cit.

kesejahteraan individu. Unit analisis yang mengukur kemakmuran negara dengan pemakaian konsep ekonomi makro, pendapatan nasional dan tingkat pertumbuhannya.

### 3. Menjamin Keamanan Nasional

Prinsip ini berasumsi bahwa kebijaksanaan luar negeri harus direncanakan untuk melindungi dari serangan menyiratkan adanya bahaya. Keberlangsungan hidup suatu bangsa diupayakan melalui jalan menjaga keamanan. Dimana masing-masing negara dalam sistem internasional tertentu, dunia dipenuhi dengan permusuhan, maka jalan yang ditempuh adalah meminimalisasi bahaya dan dampak konflik terhadap keamanan negara.

### 4. Melindungi Martabat Nasional

Prinsip keempat ini dianalogikan sebagai individu di tengah-tengah komunitas masyarakat tempat ia hidup. Individu ini akan selalu memikirkan reputasi pribadinya pada setiap tindakan yang dilakukan dalam interaksi dengan individu dalam komunitasnya. Demikian juga sebuah negara, biasanya bertindak untuk memperoleh perhatian negara lain, supaya dihormati dan memperoleh konsesi status. *Prestige* oleh Harold Nicholson diartikan sebagai atribut kedaulatan. Oleh karena itu suatu negara bertindak di arena politik internasional agar kebanggaan dan martabatnya dapat dipelihara.

### 5. Membangun Kekuasaan

Kekuasaan politik adalah kemampuan di dalam tiap hubungan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Dalam dunia internasional, sebuah negara yang kecil (*periphery*) akan dikuasai oleh negara yang besar (*center*), dan begitu juga untuk memaksimalkan *power* oleh negara dapat ditempuh dengan kepemilikan teknologi persenjataan mutakhir dan canggih.

Lima prinsip dasar ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan politik luar negeri suatu bangsa. Setelah menetapkan prinsip-prinsip tujuan politik luar negeri, tidaklah cukup untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara. Akan tetapi ada beberapa fakta menunjukkan adanya pengaruh status negara dalam arena politik internasional. Sebuah tindakan yang dipilih suatu negara untuk mencapai tujuan akan dipengaruhi oleh kemampuan yang dimilikinya. Dengan kata lain, tujuan diterapkannya sebuah kebijakan akan dapat dicapai hanya jika negara itu memiliki kapabilitas.

Definisi kapabilitas adalah kemampuan negara untuk mengadakan perubahan dalam lingkup internasional bagi kepentingan dirinya. Negara melakukan usaha-usaha efektif dalam dunia nyata dengan kapabilitasnya, sarana yang dipilih dan taktik yang dipakai untuk mencapai tujuan hanyalah merupakan fungsi kapabilitas negara secara keseluruhan untuk bertindak dalam situasi yang dihadapinya. Kapabilitas ini kemudian sebagai penentu dalam keberhasilan politik luar negeri atau dalam mengubah kebijakan politik luar negeri.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>Dahlan Nasution, *Politik Internasional: Konsep dan Teori*, Penerbit Erlangga, 1989, hal 25-27.

Telah dikemukakan tujuan politik luar negeri dan kapabilitas sebagai faktor pendukung. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Indonesia maupun Rusia yang berhubungan terhadap kecelakaan ini termasuk politik luar negeri. Dan didalam politik luar negeri itupun terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi didalamnya.

### **Hipotesa**

Dari pokok permasalahan yang ada, dan menggunakan kerangka pemikiran/teori yang telah dipilih, maka bisa diambil hipotesa bahwa :

Kecelakaan sukhoi ini yang awalnya menimbulkan banyak isue-isue negatif malah akan berdampak positif, karena baik pihak Indonesia maupun Rusia menjadikan momentum kecelakaan ini sebagai awal makin terbukanya kerjasama antara Indonesia Rusia. Semakin terbukanya kerjasama antara Indonesia dan Rusia inilah yang akan membuat hubungan bilateral kedua negara semakin erat.

### **Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan, baik akademik maupun ilmu pengetahuan, dimana secara akademik adalah sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (S-1) pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tujuan penulisan skripsi ini secara ilmu pengetahuan adalah untuk memperbanyak bahan-bahan kajian dengan tema yang sesuai dengan mata kuliah Politik Uni Eropa

terutama dalam membahas tentang hubungan bilateral antara Indonesia dengan Rusia paska tragedi Sukhoi 2012.

### **Jangkauan Penelitian**

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak terlalu jauh dan luas dalam pembahasannya maka penulis memberikan batasan waktu. Jangkauan penelitian dalam penulisan ini, penulis menekankan penggunaan batas waktu peristiwa yang terjadi pada masa awal waktu terjadinya kecelakaan pesawat sukhoi yaitu pada 9 mei 2012 sampai akhir tahun 2012 yaitu waktu skripsi ini dibuat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga akan menggunakan data-data diluar rentan waktu tersebut sepanjang masih relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

### **Metode Penulisan dan Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau studi pustaka yang dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder dalam hal ini diwakili oleh informasi-informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan pertimbangan yaitu:

1. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan yang meliputi literatur yang dinilai relevan, surat kabar dan internet.
2. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatif (menjelaskan) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, kapan atau berapa yang

berwujud pada menganalisa dari fakta-fakta yang terkumpul, yang didapat melalui data kualitatif.

3. Metode yang digunakan berdasarkan hubungan dengan obyek penelitian yaitu *historical comparative research*, dengan melihat dari pendekatan sejarah dalam penjabarannya untuk mengkaji peristiwa berdasarkan urutan waktu dari masa lalu hingga masa sekarang.

### **Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Penggambaran keseluruhan dari tiap-tiap bab adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan**, merupakan pendahuluan yang memuat alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penulisan, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.
- Bab II. Politik luar negeri Indonesia**, berisi tentang gambaran umum bagaimana perpolitikan luar negeri Indonesia dan bagaimana pasang surut perkembangannya dari masa ke masa.
- Bab III. Dinamika hubungan bilateral Indonesia**, berisi tentang bagaimana hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, termasuk kerjasama yang terjalin beserta pasang surutnya hubungan bilateral Indonesia-Rusia.
- Bab IV. Hubungan bilateral Indonesia-Rusia, sampai tragedi kecelakaan sukhoi superjet 100**, berisi tentang bagaimana kecelakaan itu bisa

terjadi, statement-statement dan tindakan-tindakan yang dikeluarkan oleh Indonesia dan Rusia dalam menanggapi kecelakaan ini serta bagaimana dampak dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral antara kedua negara Indonesia Rusia.

**Bab V. Kesimpulan,** berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.

**Lampiran dan Daftar Pustaka,** berisi data buku, literatur, dan artikel yang digunakan selama penulisan dan dicantumkan dalam tulisan ini.